

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit dengan membandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan konstruksi delik, kualifikasi sanksi pidana, serta ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara KUHP dan Undang-Undang Perkebunan. KUHP mengkualifikasikan pencurian sebagai delik materiil yang menitikberatkan pada akibat berupa kerugian, sedangkan Undang-Undang Perkebunan mengkonstruksikan perbuatan tersebut sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan memanen atau memungut tanpa izin. Dari segi sanksi, KUHP memungkinkan pengkategorian sebagai tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan nilai kerugian, sedangkan Undang-Undang Perkebunan tidak mengenal batasan nilai kerugian dan memberikan ancaman sanksi yang lebih berat. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* seharusnya menempatkan Undang-Undang Perkebunan sebagai dasar hukum utama dalam menangani tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut belum konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum agar tercapai kepastian, keadilan, dan efektivitas dalam penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Lex Specialis, Pencurian, Kelapa Sawit, KUHP, Undang-Undang Perkebunan

## ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle in the crime of theft of oil palm plantation products by comparing the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. The main issue addressed in this research is the difference in the construction of criminal offenses, the qualification of sanctions, and the inconsistency of law enforcement officials in determining the applicable legal basis. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively using a deductive method. The results show that there are fundamental differences between the KUHP and the Plantation Law. The KUHP classifies theft as a material offense focusing on the resulting loss, while the Plantation Law constructs it as a formal offense emphasizing the act of harvesting or collecting plantation products without authorization. In terms of sanctions, the KUHP allows classification as a minor offense based on the value of the loss, whereas the Plantation Law does not impose such limitations and provides more severe penalties. The application of the *lex specialis derogat legi generali* principle should prioritize the Plantation Law as the primary legal basis in handling the theft of oil palm plantation products. However, in practice, its application remains inconsistent, leading to legal uncertainty and disparity in judicial decisions. Therefore, consistency and clear guidelines for law enforcement officials are necessary to achieve legal certainty, justice, and effectiveness in law enforcement.

Keywords: Lex Specialis, Theft, Oil Palm Plantation, Code, Plantation Law